BAB III
DATA HASIL PENELITIAN

PERPUSTAKAAN IGI · STIE · STIE · IGI

3.1 GAMBARAN UMUM

3.1.1 Sejarah BAPPEDA TK. I Jawa Barat

Pada tahun 1969 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani masalah pembangunan di Da-erah yang disebut Badan Pembangunan Daerah (BAPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur No. 163 tahun 1969 tertanggal 16 Agustus 1969. Badan ini merupakan embrio Badan Perencanaan Pembangunan Di Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1972, Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Pembangunan Daerah tersebut menjadi Badan Perancang Pembangunan Daerah yang disingkat BAPEMDA untuk Daerah Tingkat I dan BAPEMKA serta BAPEMKO untuk Kabupaten dan Kotamadya.

BAPEMDA, BAPEMKA serta BAPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat Regional dan Lokal, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 43 tahun 1972. Setelah berjalan 2 (dua) tahun kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan Surat Keputusan Presiden No. 15 tahun 1974, walaupun baru sampai Daerah Tingkat I, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih tetap berlaku Surat Keputusan Gubernur. Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980 Badan Perencanaan di Daerah Tingkat II tersebut diakui secara Nasional. Dengan Surat Keputusan Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan. Pembangunan Daerah Tingkat I atau BAPPEDA Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II.

Pertimbangan yang mendasari terbitnya Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu :

a) Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah, diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.

b) Untuk menjamin lajunya perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah serta terpadu.

Ketua BAPEDA adalah Gubernur yang di dalam tugas sehari-harinya dibantu oleh seorang Ketua Harian. Ketua Harian BAPEDA pada waktu itu ialah Bapak Ir. Soehoed W.P. yang kemudian menjadi ketua BAPPEDA pertama. Ketua BAPPEDA yang kedua adalah Dr. Ateng Syafrudin, SH.

3.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BAPPEDA

a. Kedudukan BAPPEDA

BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berada di Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat, sedangkan BAPPEDA Tingkat II berada di Wilayah Kabupaten atau Kotamadya.

BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I merupakan Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan BAPPEDA Tingkat II merupakan Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II. BAPPEDA Tingkat I mempunyai hubungan fungsional dengan BAPPEDA Tingkat II maupun dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

b. Tugas BAPPEDA

BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan serta menilai pelaksanaan rencana Pembangunan di Daerah Tingkat I, sedangkan BAPPEDA Tingkat II bertugas membantu Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan serta menilai pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah Tingkat II. Dalam melaksanakan tugasnya, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II harus berusaha menterpadukan Rencana Nasional dan Rencana Daerah, mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang ada di Wilayahnya.

c. **Fungsi BAPPEDA**

a) Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah, menyusun Repelita Daerah, dan menyusun Program Tahunan Daerah.

b) Mengkoordinasikan perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal. Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada di Wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah dengan Koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.

c) Melaksanakan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian bagi kepentingan pembangunan di Daerah.

d) Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan perencanaan selanjutnya.

e) Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

f) Melakukan Kegiatan lainnya dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Fungsi-fungsi tersebut di atas berlaku juga untuk BAPPEDA Tingkat II2.

3.1.3 Struktur Organisasi Serta Uraian Tugas dan Wewenang BAPPEDA TK. I Jawa Barat

Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Bidang Penelitian
- Bidang Ekonomi
- Bidang Sosial Budaya
- Bidang Fisik dan Prasarana
- Bidang Statistik dan Laporan

Selanjutnya telah ditetapkan pula tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat I.

Untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretaritan, maka sekretariat BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I.
b. Melakukan urusan Dokumentasi dan Informasi pembangunan.
c. Melakukan urusan keuangan
d. Melakukan urusan Umum.

Adapun tugas dari masing-masing unit kerja di lingkungan sekretariat adalah sebagai berikut :

a) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan

Sub bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan dokumentasidan memberikan infomrasi mengenai Rencana Pembangunan Daerah serta melakukan Perpustakaan.

c) Sub Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

d) Sub bagian Umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas.

2. Bidang Penelitian

Bidang penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana dalam

rangka perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan fungsi bidang penelitian, adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk pembangunan di daerah.
b. Melakukan dan mengkoordinasikan penelitian, sosial budaya, fisik dan prasarana serta mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas penelitian sebagai salah satu bahan perencanaan, tugas masing-masing unit kerja bidang penelitian adalah sebagai berikut :

a) Seksi Ekonomi

Seksi ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian di bidang ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya.

b) Seksi Sosial Budaya

Seksi sosial budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk merencanakan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama di bidang sosial budaya dengan lembaga lainnya.

c) Seksi Fisik dan Prasarana

Seksi fisik dan prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian di bidang fisik dan prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya.

d) Seksi Pengembangan Wilayah

Seksi pengembangan wilayah mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan wilayah bagi perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian pengembangan wilayah dengan lembaga-lembaga lainnya. Khususnya dalam rangka penelitian pola tata ruang

untuk pemanfaatan ruang/wilayah secara optimal sehingga diperoleh keterpaduan antar berbagai sektor.

3. Bidang Ekonomi

Bidang ekonomis mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang ekonomi mempunyai fungsi :

a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Daerah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah Tingkat II yang bersangkutan.
c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Nasional.

Adapun tugas dari masing-masing unit kerja di lingkungan bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

1) Seksi Pertanian

Seksi pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan terencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi

Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.

3) Seksi Perdagangan dan Koperasi

Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian.

4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha

Seksi Dunia usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pembangunan dunia usaha pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

4. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan mental spiritual, kesejahteraan rakyat, pemerintah, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas perencanaan bidang sosial budaya, mempunyai fungsi :

a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan mental spiritual, pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintahan daerah, instansi-instansi vertikal, daerah-daerah Tingkat II, dan badan-badan yang berada di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.

3.2 Kegiatan Selama Kerja Praktek Lapangan

3.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Yang Menumbuhkan Hubungan Intern Yang Baik

Mendokumentasikan semua kegiatan BAPPEDA yang bersifat intern atau ekstern, dalam arti kata intern adalah semua kegiatan yang diadakan dan diselenggarakan di dalam lingkungan BAPPEDA TK. I Jawa Barat, dan hanya dikhususkan untuk diikuti oleh para karyawan dan karyawati BAPPEDA JABAR. Sebagai contoh kegiatan dokumentasi, ketrika memperingati HUT Proklamasi RI, penulis bersama para staff Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi bertugas untuk mendokumentasikan semua kegiatan tersebut dengan cara memvisualisasi semua kegiatan dalam bentuk visualisasi foto dan visualisasi video.

3.2.2 Pelaksanaan Dokumentasi Bahan Atau Hubungan Yang Bersifat Ekstern

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis lebih banyak melaksanakan dokumentasi bahan yang berati kegiatan yang bersifat pembuatan dan pengetikan bahan untuk konsep sambutan pimpinan, atau pembuatan konsep surat untuk instansi lain setelah pengetikan selesai diteruskan dengan proses penandatanganan kepada pimpinan dan setelah disetujui proses terakhir adalah penggandaan dengan tujuan untuk dijadikan arsip. Kadang-kadang penulis juga melaksanakan perekaman diskusi rapat sebagai bahan untuk dijadikan notulen.

3.2.3 Pemberian Informasi Kepada Pihak Intern dan Ekstern

Dalam hal ini penulis lebih banya menjadi pengamat, pemberian Informasi ini bisa diberikan langsung pada pihak yang membutuhkan jika pihak tersebut datang secara langsung ke BAPPEDA JABAR dan biasanya proses pemberian informasi ini dilakukan secara langsung oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informas, atau bisa juga melaui Media Massa (cetak & elektronik) bila perlu, pemberian informasi ini diberikan kepada semua pihak yang membutuhkan baik pihak intern ataupun ekstern (dari instansi lain) yang kiranya semua informasi tersebut segala hal yang berkaitan dengan BAPPEDA TK. I Jawa Barat dan semua produk – produknya.

Saat ini Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi bekerja sama dengan RRI BANDUNG telah menerbitkan suatu majalah bulanan yang diberi nama WARTA BAPPEDA.

WARTA BAPPEDA adalah majalah yang beredar disekitar BAPPEDA JABAR dan BAPPEDA TK. II yang memuat semua berita dan informasi mengenai BAPPEDA TK. I Jawa Barat.

3.3 Kesulitan Selama Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek ini penulis mengalami sedikit kesulitan diantaranya adalah :

1. Terbatasnya waktu pelaksanaan dalam menjalani kerja praktek ini karena adanya berbagai masalah dalam mencari tempat untuk melaksanakan kerja praktek
2. Kurang terpenuhinya fasilitas yang ada di instansi dimana penulis melakukan kerja praktek .
3. Kurang terpenuhinya sarana perpustakaan yang ada di bagian Dok dan Info sehingga penulis mengalami kesulitan dalam mencari bahan penulisan.
4. Kurang adanya kerjasama antara kedua belah pihak.
5. Masih minimnya pengalaman dalam lingkungan kerja, sehingga penulis sulit untuk beradaptasi.
6. Sulitnya menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi pada lingkungan pekerjaan.
7. seringkali terjadi ketidak sesuaian antara teori dan praktek dalam lingkungan pekerjaan yang nyata, sehingga tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dalam melakukan suatu tindakan..


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI